

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah kesimpulan umum sebagai berikut:

Jika melihat kepada ketentuan yang ada pada Konvensi ICSID, Keppres 31/2012 diklasifikasikan sebagai bentuk Notifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Konvensi ICSID, dan karenanya Keppres 31/2012 hanya bersifat informatif dan tidak memiliki konsekuensi terhadap yurisdiksi ICSID. Yurisdiksi ICSID tetap didasarkan pada klausul ISDS yang ada pada perjanjian investasi internasional.

Keppres 31/2012 dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengubah perjanjian investasi internasional apabila klausul ISDS yang ada pada perjanjian investasi internasional tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Keppres 31/2012 oleh para pihak dalam perjanjian. Jika Keppres 31/2012 diterapkan namun klausul ISDS dalam perjanjian investasi internasional tersebut tidak disesuaikan dengan ketentuan Keppres 31/2012, maka penerapan Keppres 31/2012 tersebut dapat menjadi pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional.

Terdapat literatur yang menyatakan bahwa Keppres 31/2012 dapat diterapkan dalam perjanjian investasi internasional (termasuk BIT) yang akan dibentuk setelah ditetapkannya Keppres 31/2012. Namun pada kenyataannya diketahui bahwa perjanjian investasi internasional yang dibentuk setelah Keppres 31/2012 tidak memuat ketentuan dari Keppres 31/2012, dan karena itu Keppres 31/2012 menjadi tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, perjanjian investasi internasional Indonesia setelah tahun 2012 dapat dianggap inkonsisten dengan Keppres 31/2012, sehingga tujuan dari Keppres 31/2012 tidak dapat terwujud, dan karena itu Indonesia dinilai tidak konsisten dalam mengatur *consent*-nya kepada ICSID. Dengan demikian, literatur tersebut menjadi salah karena tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan pada bab ini maka dapatlah disarankan sebagai berikut:

1. Alangkah lebih baik jika Indonesia tetap konsisten untuk mengatur *consent*-nya kepada ICSID. Jika Keppres 31/2012 telah ditetapkan dan disampaikan kepada ICSID supaya ICSID mengecualikan sengketa investasi yang timbul dari keputusan tata usaha negara pemerintah kabupaten, maka Indonesia harus menguatkan Keppres 31/2012 tersebut dengan cara menyesuaikan klausul ISDS pada perjanjian investasi internasional yang telah ada sebelum tahun 2012 dengan ketentuan dalam Keppres 31/2012 maupun merumuskan dan/atau memodifikasi perjanjian internasional agar klausul ISDSnya sesuai dengan Keppres 31/2012. Jika tidak, maka Keppres 31/2012 ini menjadi tidak dapat diberlakukan kepada investor asing.
2. Pada hakikatnya, *consent* yang diberikan oleh Indonesia merupakan bagian dari lobi politik internasional. Karena itu, adalah lebih bagus apabila pada literatur tidak dinyatakan bahwa Keppres 31/2012 akan berlaku bagi perjanjian investasi internasional yang dibentuk setelah tahun 2012. Lebih baik bagi literatur untuk menyatakan kurang lebih sebagai berikut: “ketentuan Keppres 31/2012 tersebut dapat berlaku kepada perjanjian investasi internasional setelah tahun 2012 dengan syarat Indonesia menyesuaikan klausul ISDS perjanjian investasi internasional setelah tahun 2012 tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Keppres 31/2012”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERJANJIAN INTERNASIONAL:**

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994 (BIT Indonesia – Belanda 1994)

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments (BIT Indonesia – Inggris)

Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia concerning the Promotion and Protection of Investments (BIT Indonesia – Australia)

Agreement on Investment Among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN - Hong Kong, China SAR Investment Agreement)

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York)

Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (Konvensi ICSID)

Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Australia – Indonesia CEPA)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina 1969)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perselisihan yang dikecualikan dari Yurisdiksi *International Centre for The Settlement Investment Dispute*

#### **PUTUSAN ICSID**

Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1, Award in Resubmitted Proceeding.

Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1, Decision on Jurisdiction in Resubmitted Proceeding

Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40, Decision on Jurisdiction (Churchill Mining Plc)

Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction.

SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/01/13, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction.

#### **BUKU:**

Christoph H. Schreuer dkk, *The ICSID Convention: A Commentary Second Edition*, New York: Cambridge University Press, 2009

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Bandung: Kent Media, 2011

Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Bandung: Keni Media, 2015

Malcolm N. Shaw, *International Law 8<sup>th</sup> Edition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017

Muhammad Iqbal Hasan, *Hukum Investasi Internasional: Teori dan Implementasi*, Bandung: Refika Aditama, 2021

- Oliver Dörr dan Kirsten Schmalenbach, *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, Berlin/Heidelberg: Springer Science+Business Media, 2012
- Safri Nugraha, et.al, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 2002
- United Nation Conference on Trade And Development, *Dispute Settlement: Investor-State*, Switzerland: United Nations, 2003
- United Nation Conference on Trade And Development, *Investor-State Dispute Settlement and Impact on Investment Rule Making*, New York and Geneva: United Nations, 2007
- United Nation Conference on Trade And Development, *Investor-State Dispute Settlement: A Sequel*, New York and Geneva: United Nations, 2014
- Zachary Douglas, *The International Law of Investment Claims*, New York: Cambridge University Press, 2009

**JURNAL:**

- Antony Crockett, *The Termination of Indonesia's BITs: Changing the Bathwater, But Keeping the Baby?*, The Journal of World Investment & Trade Volume 18 Nomor 5-6, Desember 2017
- Carolyn B. Lamm, *Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes*, ICSID Review – Foreign Investment Law Journal Volume 6 Issue 2, 1991
- Christopher T Curtis, *Amco Asia Corp. v Republic of Indonesia*, American Journal of International Law Volume 83 No. 1, Januari 1989
- David Price, *Indonesia's Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment*, Asian Journal of International Law Volume 7 Nomor 1, Januari 2017
- Gautama, *Perjanjian-Perjanjian Internasional Indonesia Mengenai Perlindungan Penanaman Modal*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 21 No. 3, Juni 1991

- Huala Adolf, *Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 3, 2014
- Jan Schokkaert, et.al, *Investment Contracts between Sovereign States and Private Companies – Link between BITs and State Contracts*, The Journal of World Investment & Trade Volume 11 No 6, Januari 2010
- La Sina, *Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 28 Nomor 1, April 2010
- Muhammad Amin Putra, *Keputusan Tata Usaha yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha*, Jurnal Hukum Peratun Volume 3 Nomor 1, Februari 2020
- M.Y. Aiyub Kadir dan Alexander Murray, *Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investor, and Indigenous Peoples*, Asian Journal of International Law Volume 9 No. 2, Juli 2019
- Pandu Rizky Putra Pratama dan Prita Amalia, *The ISDS Mechanism and Standards of Protection in the Investment Treaty*, Jurnal Lentera Hukum Volume 7 Issue 2, Juli 2020
- Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, *Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID oleh Keputusan Presiden*, Majalah Hukum Nasional Volume 48 No. 1, Juli 2018
- Rachel Wellhausen, “*Recent Trends in Investor State Dispute Settlement*”, Journal of International Dispute Settlement Volume 7 Nomor 1, Maret 2016
- Sefriani, *The Urgency of International Investment Agreement (IIA) and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 18 No.2, Mei 2018

#### **INTERNET:**

- Claimant's Letter to the President of the Republic of Indonesia, a Request for Legal Protection, diakses 30 Maret 2021, [Microsoft Word - ICD - Ltr to Pres-DQ-200412\\_english\\_Final.doc \(italaw.com\)](#)
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diakses 18 April 2021, [indonesia raih kemenangan mutlak di forum arbitrase icsid - Direktorat Jenderal](#)

[Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI \(ahu.go.id\)](#)

International Investment Agreements Navigator, diakses 11 Agustus 2020, [Indonesia | International Investment Agreements Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub](#)

Irene Kristiani Tampubolon dan Paidi Hidayat, *Analisis Sovereign Risk Di Negara-Negara ASEAN*, diakses 27 Maret 2020, [14769-ID-analisis-sovereign-risk-di-negara-negara-asean.pdf \(neliti.com\)](#)

J.J. Losari dan M. Ewing-Chow, *Pacific Rim Investment Treaty Practice: Regional Consideration – Reflective or Reactionary? Indonesia's Approaches to International Investment Agreements and Recommendations for the Future*, diakses tanggal 18 April 2021, [www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2179](#)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 18 April 2021, [Kronologi Kemenangan Indonesia Atas Gugatan Churchill Mining dan Planet Mining \(kemenkeu.go.id\)](#)

Maria Farida Indrati, *Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres?*, diakses 7 Juli 2021, [Apa Beda Keppres-perpres-inpres \(ui.ac.id\)](#)

Model BIT Indonesia, diakses 27 Maret 2021, [Indonesia | International Investment Agreements Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub](#)

Report of the Executive Directors on the ICSID Convention, diakses 20 Januari 2021, [Report of the Executive Directors on the ICSID Convention | ICSID \(worldbank.org\)](#)

Robert N. Hornick dan Mark A. Nelson, *Foreign Investment in Indonesia*, diakses 2 Juli 2021, [Foreign Investment in Indonesia \(fordham.edu\)](#)

Stephen L. Magiera, *International Investment Agreements and Investor-State Disputes: A Review and Evaluation for Indonesia*, diakses 4 April 2021, [International Investment Agreements and Investor-State Disputes: A Review and Evaluation for Indonesia \(eria.org\)](#)